



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Februari 2025

Halaman: 2

Tuntutan Jadup PKL Terbentur Efisiensi Anggaran

YOGYA (MERAPI) - Sejumlah pedagang yang sebelumnya berjualan di Teras Malioboro (TM) 2 menuntut pemerintah memberikan jaminan hidup (jadup) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY, Jumat (7/2). Aksi tersebut sempat diwarnai keributan antara PKL dengan pelaku usaha Malioboro lainnya karena merasa terganggu.

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan, tuntutan memberikan jaminan hidup tersebut, harus melalui kajian mendalam. Beny mengatakan, saat ini, terdapat kebijakan efisiensi anggaran, dari pusat hingga daerah. Memberikan jaminan hidup kepada PKL TM2 yang saat ini telah direlokasi ke lokasi baru, tentu tidak

bisa serta merta dilakukan. Namun, bukan berarti aspirasi dari PKL ini tidak diperhatikan.

Beny menyebut, Pemda DIY selama ini memang tidak memberikan jaminan hidup berupa penyaluran sembako maupun Bantuan Langsung Tunai, namun, telah menyediakan tempat beserta fasilitas lengkap kepada PKL. Di tempat yang baru, PKL belum dipungut retribusi, agar mereka melakukan penyesuaian terlebih dahulu.

"Jaminan hidup yang sudah diupayakan oleh Pemda kan membebaskan dari kewajiban-kewajiban yang mestinya dipenuhi seperti fasilitas, sewa-sewa. Ya kita bebaskan dulu, supaya punya daya tahan dulu.

Jangankan yang baru pindah ke lokasi TM Baru, ini yang di TM 1 saja, sudah 3 tahun belum sama sekali kita tarik retribusi," kata Beny.

Sebelum dilakukan pergeseran, Beny mengatakan telah mempersiapkan dengan matang baik lokasi maupun fasilitas untuk PKL. Saat ini, lokasi sudah terpadu, sehingga wisatawan bisa terkonsentrasi di titik tersebut untuk berbelanja. Tidak hanya itu, Pemda DIY juga berupaya membuat magnet supaya pengunjung lebih tertarik. Ada banyak upaya yang dilakukan dari promosi media online, event, hingga menggandeng Pekan Budaya Tionghoa untuk kembali diselenggarakan di kawasan TM Baru.

Terkait dengan ketidakpuasan sebagian pedagang, Beny mengatakan, menghargai dan menghormati aspirasi tersebut. Setiap kebijakan menurutnya, sebaik apapun itu, pasti tetap ada yang merasa tidak puas. Meskipun begitu, Pemda DIY telah berupaya untuk mengambil kebijakan sebaik mungkin, untuk kebaikan PKL maupun DIY. "Kita sudah tata, kemudian kita juga sudah melakukan optimalisasi dukungan-dukungan operasional. Kami perhatikan terutama pembebasan dari semua retribusi. Kemudian keluhan-keluhan yang bisa kami selesaikan, kami selesaikan. Tapi kalau sampai jaminan hidup ya harus kita hitung betul kapasitas kami," ujar Beny. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005